

**POLITICAL WILL STAKEHOLDER DALAM  
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI  
DESA SELANGKAU KECAMATAN KALIORANG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**MUHAMMAD NASEEM MUJAHID AL-QARANA**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 12, Nomor 03 , 2025**

# **POLITICAL WILL STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DESA SELANGKAU KECAMATAN KALIORAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Muhammad Naseem Mujahid Al-Qarana<sup>1</sup>, Yahdi Qolbi<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada upaya menggali, memahami, dan mendeskripsikan fenomena terkait political will para stakeholder dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Desa Selangkau. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berusaha mengungkap bentuk keterlibatan, sinergi, serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat..*

**Kata Kunci :** *political will, Pendidikan, stakeholder*

## **Pendahuluan**

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan tonggak penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi orang yang cerdas, berakhlak baik, dan bertanggung jawab (Nasution, 2008). Untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, undang-undang ini memandang pendidikan sebagai proses yang mencakup semua aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Selain itu, UU ini menetapkan kurikulum yang relevan dan fleksibel serta menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru. Secara keseluruhan, undang-undang ini menciptakan dasar hukum yang memungkinkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berfokus pada pengembangan karakter, dengan harapan menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Kesenjangan pendidikan di Kalimantan Timur masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya alam dan berperan penting dalam ekonomi nasional (Juliansyah, 2024). Akses ke pendidikan tidak merata, dengan penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-15 tahun di provinsi ini telah menerima pendidikan dasar, namun ada ketimpangan signifikan di kalangan anak usia 16-18 tahun yang belum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dailylifepr@gmail.com@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mendapatkan pendidikan menengah. Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi, dan lokasi tinggal menjadi faktor yang memengaruhi ketidaksetaraan ini (Ayuningtyas, 2021).

Di samping itu, wilayah terpencil seperti Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu tertinggal dibandingkan kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Hambatan-hambatan seperti infrastruktur yang terbatas, kekurangan tenaga pengajar, kondisi keuangan yang sulit, dan akses yang minim ke institusi pendidikan semakin memperburuk disparitas pendidikan di daerah ini, Dewanti & Shofa (2024). Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Roma Malau menuturkan, kekurangan tenaga pengajar terdapat di wilayah pesisir dan pelosok Kutai Timur hingga ke Perkotaan, Pesatnya pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kebutuhan tenaga pengajar, kurangnya tenaga pengajar akan menyebabkan proses pembelajaran tidak efisien sehingga kualitas pendidikan tidak maksimal, (Abdul Rahman, 2024).

NO	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	208	14,09%
2	Tamat SD Sederajat	470	31,84%
3	Belum Tamat SD/Sederajat	214	14,50%
4	SLTP/Sederajat	177	11,99%
5	SLTA/Sederajat	350	23,71%
6	Diploma IV/Strata I	56	3,79%
7	Strata II	1	0,07%
JUMLAH		1,476	100,00%

Berdasarkan data di atas, terlihat gambaran umum tingkat pendidikan penduduk di Desa Selangkau pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, atau sekitar 23,71%, telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah ini cukup mementingkan pendidikan menengah. Namun, data juga menunjukkan adanya proporsi yang cukup signifikan dari penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sekitar 28% penduduk tercatat sebagai tidak/belum pernah sekolah atau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Hal ini menandakan masih adanya tantangan dalam akses dan penyelesaian pendidikan dasar di wilayah tersebut. Di sisi lain, proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi, seperti Diploma IV/Strata I dan Strata II, masih relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tinggi di wilayah ini belum terlalu merata.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Nurfatimah et al., 2022) mengemukakan bahwa Kualitas pendidikan kini menjadi topik serius karena sangat berpengaruh pada mutu lulusan. Pendidikan yang rendah kualitasnya mengurangi harapan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu harus menjadi fokus semua pihak,

termasuk masyarakat. Melihat hasil data yang diperoleh UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report yang dilakukan pada tahun 2016, mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia menduduki tingkat 10 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia (Utami, 2019). Sementara itu, merujuk kepada hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang merupakan sebuah organisasi yang menilai mutu pendidikan di dunia, pada tahun 2018 peringkat kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di kedudukan golongan rendah, yaitu dengan menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Hasil data tersebut cenderung stagnan di dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir (Indartiningsih, 2023).

(Nurfatimah et al., 2022) Mengatakan Citra Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masih jauh dari target SDGs. Kesenjangan pendidikan menjadi hambatan utama untuk mencapai pendidikan berkualitas. Situasi di kota besar jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil dan miskin (3T Disparitas pedagogis di Indonesia terlihat dari ketidakmerataan sarana dan prasarana serta sumber daya pengajaran yang tersedia. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi isu penting, karena sekolah di perkotaan sering kali memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Ini terlihat dari infrastruktur dan fasilitas sekolah yang lebih memadai di kota dibanding di Desa. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas pendidikan di daerah pedesaan adalah kekurangan infrastruktur pedagogis. Dari 1.300.000 kelas yang ada, sekitar 59% masih beroperasi, sementara 23% dalam kondisi rusak berat, dan 18% mengalami kerusakan signifikan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil dan pedesaan sering terhambat oleh masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai (Winandar et al., 2022).

Meskipun akses pendidikan telah meningkat, dengan angka partisipasi yang lebih tinggi di semua jenjang, kualitas pendidikan masih menjadi masalah. Menurut laporan dari World Bank, banyak sekolah di Indonesia masih kekurangan sumber daya, termasuk fasilitas, buku, dan guru yang berkualitas. Hal ini berdampak pada kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Ada ketimpangan yang mencolok dalam pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan fakta sosialnya mengenai kualitas pendidikan di pelosok Indonesia terutama di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Kaliorang Desa Selangkau yang cukup rendah, kurangnya fasilitas dan perhatian dari stakeholder setempat. Dengan adanya permasalahan permasalahan seperti tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat partisipasi sekolah, maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai hal tersebut.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori Political Will***

Menurut Brinkerhoff (2010) secara teoritis Politik will ialah kemauan dan komitmen para pemimpin politik untuk mengambil tindakan guna mencapai

serangkaian tujuan disertai dengan upaya berkelanjutan. Selain itu ia juga mengidentifikasi political will menjadi beberapa komponen yaitu;

1. Inisiatif Pemerintah: Adanya dorongan dari pemimpin untuk memulai dan mendukung kebijakan yang diinginkan
2. Pilihan Kebijakan Berdasarkan Analisis: Kebijakan harus didasarkan pada analisis teknis dan pertimbangan yang matang.
3. Mobilisasi Pemangku Kepentingan: Dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan.
4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya: Pemimpin harus menunjukkan komitmen melalui alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan.
5. Keberlanjutan Usaha: Upaya untuk mencapai tujuan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons sementara.
6. Penegakan Hukum: Kebijakan harus dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan dapat dipercaya untuk memastikan bahwa aturan diikuti dan pelanggaran ditindaklanjuti.
7. Adaptasi dan Pembelajaran: Kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan mengadaptasi kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi

Berdasarkan pernyataan (Mujkić, 2015) mendefinisikan political will sebagai konsep yang kompleks dan beragam, yang terdiri dari berbagai subkonsep, yaitu;

1. Distribusi Preferensi: Berkaitan dengan hasil yang diinginkan oleh pemimpin dan masyarakat.
2. Otoritas, Kapasitas, dan Legitimasi: Menyangkut kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh pembuat keputusan atau reformis.
3. Komitmen terhadap Preferensi: Mengacu pada keseriusan dan ketulusan dalam mendukung reformasi.

Politikal Will jika disimpulkan adalah kesediaan dan komitmen pemimpin untuk mengambil tindakan demi mencapai tujuan tertentu, ini melibatkan usaha yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Political will berkaitan dengan keinginan dan tindakan nyata dari pemimpin politik untuk menjalankan kebijakan yang dapat membawa perubahan positif, political will sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

### **Teori Stakeholder**

Pendapat dari (Freeman, 1984) Dalam bukunya "Strategic Management: A Stakeholder Approach" (1984), ia mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Freeman berargumen bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat.

Menurut (Donaldson & Preston, 1995) mengemukakan tiga aspek utama dari teori stakeholder:

1. Deskriptif: Menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana manajer mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok.
2. Instrumental: Menggunakan data empiris untuk menunjukkan hubungan antara manajemen stakeholder dan pencapaian tujuan perusahaan, seperti profitabilitas.
3. Normatif: Menyediakan panduan moral atau filosofi untuk operasi dan manajemen perusahaan, menekankan tanggung jawab moral terhadap semua stakeholder.
4. Sedangkan (Hörisch et al., 2020) menafsirkan political will sebagai Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap hasil dan keputusan organisasi. Mereka dapat mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan pemegang saham.

Sedangkan (Hörisch et al., 2020) menafsirkan political will sebagai Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap hasil dan keputusan organisasi. Mereka dapat mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan pemegang saham.

Secara Keseluruhan stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua stakeholder. Teori stakeholder mencakup tiga aspek: deskriptif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi; instrumental, yang menunjukkan hubungan antara manajemen stakeholder dan pencapaian tujuan; serta normatif, yang menekankan tanggung jawab moral perusahaan terhadap semua pihak. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder-nya.

### **Teori Kualitas Pendidikan**

Menurut (Suryadi & Tilaar, 1993) dalam karya mereka "Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar" menjelaskan kualitas pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi meningkatkan kemampuan belajar peserta didik secara maksimal. Konsep ini menekankan pentingnya proses pendidikan dan hasil yang dicapai, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling berhubungan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu mereka juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas melalui Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengajar. Kurikulum yang Relevan dengan Penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga siswa dapat bersaing di tingkat global. Aksesibilitas Pendidikan dengan Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.

Pendidikan berkualitas juga menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini berarti pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup di masyarakat. Lulusan pendidikan berkualitas diharapkan mampu menjadi warga negara yang produktif, kreatif, dan kritis. Mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang sangat efektif untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan, mulai dari pihak pemerintah desa hingga individu yang terlibat dalam sektor swasta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan beragam, sehingga dapat membangun gambaran sistematis tentang fakta atau kejadian yang terjadi di lapangan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Temuan ini menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder, dalam hal ini pemerintah desa, dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Meskipun tidak ada bantuan keuangan, pemerintah desa memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pendukung kegiatan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan politik dan keterlibatan stakeholder dapat berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal, bahkan tanpa dukungan keuangan langsung.

#### ***Inisiatif Pemerintah Desa***

Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, inisiatif pemerintah dan keterlibatan pemerintah desa sangat penting. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana political will dari para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah desa dan swasta setempat dapat mempengaruhi implementasi program pendidikan di daerah tersebut. Fokusnya adalah pada bagaimana kerja sama antara pemerintah desa, swasta dan instansi dapat meningkatkan kualitas

pendidikan di desa terpencil seperti Desa Selangkau. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti universitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Selangkau Pemerintah Desa memberikan ruang aspirasi kepada masyarakat dan menyeleksi kembali program mana yang perlu diprioritaskan dibersamai oleh perusahaan swasta yang ada lalu membuat proposal dimana hal tersebut akan menjembatani alokasi dana dari perusahaan ke Desa, hal ini menunjukkan adanya komitmen dan kemauan yang kuat antar kedua belah pihak untuk memberikan dampak positif kepada desa Selangkau.

Hal ini sejalan dengan teori Political Will Menurut (Brinkerhoff, 2010) yang dimana secara teoritis Politikal will ialah kemauan dan komitmen para pemimpin politik untuk mengambil tindakan guna mencapai serangkaian tujuan disertai dengan upaya berkelanjutan. Seperti salah satunya adalah Inisiatif Pemerintah: Adanya dorongan dari pemimpin untuk memulai dan mendukung kebijakan yang diinginkan.

Hasil temuan di Desa Selangkau menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan inisiatif yang mencerminkan political will, khususnya sesuai dengan komponen inisiatif pemerintah oleh (Brinkerhoff, 2010), yang menekankan adanya dorongan dari pemimpin untuk memulai dan mendukung kebijakan publik. Meskipun tidak ada alokasi bantuan keuangan langsung, pemerintah desa mendukung pendidikan melalui peminjaman balai desa untuk kegiatan formal sekolah serta penyediaan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, voli, dan takraw. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Nurhawati yang menegaskan keterlibatan pemerintah desa sebagai stakeholder dalam mendukung kegiatan pendidikan. Dukungan tersebut mencerminkan bentuk partisipasi aktif yang menunjukkan bahwa inisiatif non-moneter pun dapat menjadi representasi dari political will dalam konteks pembangunan pendidikan di tingkat local. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan teori stakeholder oleh (Freeman, 1984) yang mengemukakan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam membangun fasilitas pendidikan dan membuka akses pemanfaatan sarana desa merupakan implementasi tanggung jawab normatifnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mencerminkan interaksi antara berbagai stakeholder yang berkontribusi pada keberhasilan pembangunan pendidikan di desa. Pendekatan ini mendukung teori kualitas pendidikan yang menuntut pengembangan menyeluruh dan teori stakeholder yang membedakan tingkat legitimasi dan peran dalam organisasi pemerintahan desa.

### ***Mobilisasi Pemangku Kepentingan Swasta***

Menganalisis mobilisasi pemangku kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Selangkau. Mobilisasi ini mencakup sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, swasta, serta masyarakat setempat, yang bersama-sama berkontribusi dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, dan fasilitas pendidikan. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat ekosistem pendidikan, tetapi juga mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks Desa Selangkau, political will atau kemauan politik dari para pemimpin desa dan pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan mobilisasi tersebut. Political will yang kuat mendorong terwujudnya program-program pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya diarahkan untuk mengatasi tantangan lokal secara tepat. Hal ini juga mencakup modernisasi sarana pendidikan dan penguatan peran masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota.

### ***Alokasi Sumber Daya***

Pentingnya alokasi sumber daya ini terletak pada bagaimana dana, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), digunakan untuk mendukung pembangunan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas, beasiswa, pelatihan, dan program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, keterlibatan stakeholder, seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, menjadi penentu keberhasilan implementasi program pendidikan yang berkualitas. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk dukungan dana, tetapi juga partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berkelanjutan.

<b>NO</b>	<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	Mengurus Rumah Tangga	349	23,64%
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	0,75%
3	Pelajar/Mahasiswa	475	32,18%
4	Petani/Perkebunan	135	9,15%
5	Nelayan	26	1,76%
6	Karyawan Swasta	273	18,50%
7	Tukang Jahit	4	0,27%
8	Perdagangan	76	5,15%
9	Guru	6	0,41%
10	Bidan	2	0,14%
11	Sopir	10	0,68%
12	Perangkat Desa	11	0,75%

13	Wiraswasta	98	6,64%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.476</b>	<b>100%</b>

Data dalam tabel menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa (32,18%) dan ibu rumah tangga (23,64%), sementara profesi guru hanya 0,41% dari total penduduk, mencerminkan keterbatasan tenaga pendidik yang tersedia. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya alokasi sumber daya pendidikan yang lebih merata dan tepat sasaran, khususnya dalam penyediaan tenaga pendidik berkualitas. Hal ini relevan dengan teori (Suryadi & Tilaar, 1993), kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya pendidikan yang meliputi fasilitas, materi ajar, dan guru berkualitas. Dalam konteks ini, political will stakeholder menjadi sangat penting, karena komitmen dan keberpihakan para pengambil kebijakan akan menentukan sejauh mana sumber daya tersebut dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Jika stakeholder memiliki kemauan politik yang kuat, maka mereka akan berani menetapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memperbaiki ketimpangan ini, seperti menambah jumlah guru, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menyediakan fasilitas dan materi ajar yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan pendidikan berkualitas di desa sangat bergantung pada sejauh mana political will para stakeholder diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan mutu sumber daya Pendidikan.

Alokasi sumber daya untuk pendidikan di Desa Selangkau masih menghadapi tantangan. Pemerintah desa menunjukkan komitmen melalui dukungan non-moneter, seperti memfasilitasi kegiatan sekolah. Namun, kontribusi dari pihak swasta, seperti PT Kobexindo, masih terbatas dan belum konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa political will dari stakeholder eksternal perlu ditingkatkan agar alokasi sumber daya dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas pendidikan di desa tersebut. Alokasi sumber daya untuk pendidikan di Desa Selangkau menunjukkan adanya dukungan dari berbagai pihak. PT Indexim memberikan bantuan tenaga guru Bahasa Inggris, menjalankan program "Saya Suka Membaca" (SMM) bekerja sama dengan KPP, dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga meliputi pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, political will dari stakeholder, terutama PT Indexim dan KPP, berperan aktif dalam mendukung pendidikan berkualitas melalui penyediaan tenaga pengajar, program literasi, dan beasiswa. Keseluruhan dukungan ini mencerminkan alokasi sumber daya yang terencana dan berkelanjutan, serta peran aktif stakeholder dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Desa Selangkau, sesuai dengan konsep political will dan peran stakeholder dalam teori (Brinkerhoff, 2010) dan (Freeman, 1984).

## **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Selangkau memiliki political will yang kuat dalam mendukung pendidikan, terutama melalui penyediaan fasilitas dan dukungan kegiatan siswa. Namun, kontribusi sektor swasta seperti PT Kobexindo masih terbatas dan cendurung hanya bersifat simbolis yakni menyentuh aspek strategis seperti peningkatan kompetensi guru. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan political will dari pemangku kepentingan swasta agar kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dapat lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Desa Selangkau.

Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Desa Selangkau menunjukkan kontribusi berbeda antara pemerintah desa dan sektor swasta seperti PT Indexim dan PT Kobexindo. Pemerintah desa menunjukkan political will yang kuat melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan kegiatan non akademik, sejalan dengan teori political will). Kolaborasi dengan sekolah telah mencerminkan dinamisnya peran antar stakeholder dalam memperkuat ekosistem pendidikan local khususnya di Desa Selangkau. Sehingga terlihat adanya komitmen yang kuat serta kolaborasi lintas sektor yang lebih optimal dan berdampak nyata, meskipun beberapa Perusahaan perannya belum maksimal.

Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai peran political will dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Desa Selangkau, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, keterlibatan sektor swasta hanya dilihat dari dua perusahaan, tanpa mengeksplorasi lebih dalam potensi kontribusi aktor swasta lainnya. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga memiliki keterbatasan dalam mengukur dampak nyata dari political will terhadap capaian pendidikan secara kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan aktor yang lebih luas serta pendekatan campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui forum komunikasi rutin untuk merancang program pendidikan yang responsif. Dari perspektif CSR, PT Indexim dan PT Kobexindo perlu meningkatkan kontribusi menjadi program jangka panjang seperti pelatihan guru dan beasiswa melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga pendidikan. Dalam konteks penelitian akademik, disarankan agar studi mendatang menggunakan pendekatan mixed methods dan memperluas cakupan wilayah serta aktor yang terlibat, guna memperoleh pemahaman yang

lebih menyeluruh dan mengukur secara kuantitatif dampak political will terhadap capaian Pendidikan.

Penelitian komparatif antar desa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat variasi implementasi political will di berbagai konteks lokal.

## **Daftar Pustaka**

Abdul Rahman. (2024). *Kekurangan Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.

Ayu Dewanti, & Ghefira Zahira Shofa. (2024). *Kesenjangan Pendidikan di Kalimantan Timur, Berbagai Faktor Jadi Penyebab*.

Ayuningtyas, I. (2021). KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>

Azizah, I. W., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). *Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities*. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>

Azzuhri, M. (2009). *PENDIDIKAN BERKUALITAS (Upaya Menuju Perwujudan Civil Society)*.

Brinkerhoff, D. W. (2010). *Unpacking the concept of political will to confront corruption*. [www.rti.org](http://www.rti.org)

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications* (Vol. 20).

Farhas, L. (2021). *PELAKSANAAN KEBIJAKAN ACEH CARONG DALAMMEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITASDI PROVINSI ACEH*.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston : Pitman.

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & Colle, S. De. (2010). *Stakeholder Theory: The State of the Art*.

Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). *Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis* (Vol. 275).

Indartiningsih, D. (2023). Kualitas Guru di Indonesia dan Korea Selatan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(5), 2019–2030. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5409>

Jannah, S. N. (2022). *Politikal Will Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Upaya Optimalisasi UMKM Di Sidoarjo*.

Juliansyah. (2024). *Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur, Pengembangan*. 5(7), p-ISSN.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. *Third Edition* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd (CA).

Mujkić, A. (2015). *POLITICAL WILL: A SHORT INTRODUCTION CASE*

STUDY - BOSNIA AND HERZEGOVINA. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Muntaqo, A. (2021). *Kompetensi Guru Menurut K.H Hasyim Asy'ari dan Urgensinya dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045: Vol. XIII* (Issue 1).

Nasution, E. (2008). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1–10.

Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan

di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>

Palambo, S. R. (2023). *Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Menurunkan Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*.

Panthee, S. K. (2022). A Theoretical Discourse on Quality Education. *Curriculum Development Journal*, 30(44), 99–112. <https://doi.org/10.3126/cdj.v30i44.54984>

Phillips, R. A. (2003). *Stakeholder Theory and Organizational Ethics*. <https://www.researchgate.net/publication/247637175>

Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). *Defining Political Will* (Vol. 38).

Safrida, Safrida, N., & Muhammad, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 71–80. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis kebijakan pendidikan : suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.

Tereshchenko, D., & Padafet, Y. (2023). *Theoretical foundations of forming and evaluating the quality of higher education*.

Utami, S. (2019). *Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia Melalui Peningkatan Kualitas Personal, Profesional, Dan Strategi Rekrutmen GurU*. 2(1), 518–527. <http://www.oecd.org/pisa/>

Winandar, M. L., Agustin, S., Listiana, Y. R., & Windayana, H. (2022). *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*. 6(2), 1200–1210.

Xingxin, W. (2024). *Research on Higher Education Theory Based on Strengthening Quality Education*.